

Ikhtisar Webinar

Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok dan Maknanya bagi Indonesia



Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok dan Maknanya bagi Indonesia

25 November 2022 | 09.30 – 12.00 WIB

Webinar Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok dan Maknanya bagi Indonesia dimoderatori oleh Reine Prihandoko selaku Analis Politik Keamanan Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45), dengan menghadirkan dua narasumber yang memaparkan hasil kajian terkait topik webinar, yaitu Klaus H. Raditio, Ph.D, pengajar Politik RRT, STF Driyarkara, serta Ardhitya E. Yeremia, Ph.D, pengajar sekaligus Sekretaris Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia. Selain itu, turut hadir pula secara daring Prof. Evi Fitriani Ph.D, Guru Besar Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, dan Dr. Rahadjeng Pulungsari Hadi, pengajar program studi Cina di Departemen Kewilayahan FIB Universitas Indonesia. Webinar juga dihadiri oleh peserta dari Kementerian Luar Negeri RI, dan KBRI Beijing. Penyelenggaraan webinar merupakan kerjasama antara LAB 45 dan LPPSP FISIP UI.

Klaus H. Raditio, Ph.D membuka sesi pemaparan kajian dengan menjelaskan perkembangan geopolitik pasca kongres ke-20 PKT dan bagaimana Amerika Serikat memberikan responnya. Prinsip “persatuan dan perjuangan” mendorong Tiongkok untuk siap melakukan kebangkitan dan menangkal tantangan internal maupun eksternal. Pertemuan antara Presiden Xi Jinping dan Joe Biden di KTT G20 Bali menjadi bermakna karena adanya komitmen untuk mengakui adanya *strategic competition* dan menghindari konflik terbuka. Pada kesempatan ini, Biden menyampaikan kekhawatirannya atas aksi Tiongkok yang semakin agresif di Taiwan. Sementara itu, Xi Jinping untuk pertama kalinya menyatakan bahwa Taiwan merupakan *core interest* bagi Tiongkok. Pertemuan ini turut melahirkan komitmen untuk menghindari adanya perang dingin dan perang nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina. Kemudian, dalam kunjungan Kamala Harris ke Palawan, Filipina, disebutkan bahwa Amerika Serikat menyampaikan komitmen terhadap *Mutual Defense Treaty* 1951, dukungan keputusan UNCLOS Tribunal tahun 2016 yang menginvalidasi klaim Beijing di Laut Tiongkok Selatan, serta dukungan kepada nelayan Filipina yang terdampak.

Ardhitya E. Yeremia Ph.D melanjutkan sesi pemaparan kajian dengan pembahasan kebijakan *Dynamic Zero-Covid* di Tiongkok. Terdapat narasi dominan yang berkembang di masyarakat Tiongkok seperti *Jianshe jiushi shengli* (gigih berarti menang) dan *Tangpin* (kaum rebahan)

yang berarti meskipun ada Covid-19, Tiongkok harus terus melawannya. Hal ini menunjukkan adanya superioritas penanganan Covid-19 di bandingkan negara-negara Barat, didukung pula dengan rendahnya angka kematian akibat Covid-19 di Tiongkok dibandingkan dengan Amerika Serikat. Namun demikian, angka Covid-19 pasca Kongres naik, bahkan diikuti dengan bertambahnya titik episentrum seperti di Shenzhen dan Guangzhou. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan *zero-covid* tidak berkelanjutan sehingga pemerintah berusaha keras untuk menghindari *lockdown* total. Adanya kebijakan *Dynamic Zero-Covid* yang ambigu menjadi sarana kontestasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, jika ada kebijakan yang kurang baik maka akan dilihat sebagai tolak ukur loyalitas terhadap Xi Jinping. Perlu diakui bahwa kebijakan *Zero-Covid* cukup memberatkan secara ekonomi. Namun, kebijakan ini juga dilakukan sebagai strategi pemerintah Tiongkok untuk mengawasi aktivitas masyarakatnya.

Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang diperkirakan akan menjadi garis-garis kebijakan luar negeri Tiongkok pasca Kongres ke-20: (1) *rebranding* dan rekalibrasi Belt and Road Initiative. Contohnya, kemunculan inisiatif seperti *Global Security Initiative* dan *Global Development Initiative* yang tidak lain bertujuan untuk memperkuat posisi geopolitik dan geoekonomi Tiongkok di dunia; (2) kesinambungan dalam hal kontrol politik terhadap mekanisme pasar; dan (3) aksi asertif di Laut Tiongkok Selatan yang berkesinambungan. Tiongkok dinilai akan lebih percaya diri dalam menghadapi Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya promosi narasi alternatif seperti anti-unilateralisme dan anti-hegemoni, serta kesiapan bersaing di bidang sains dan teknologi. Pasca kongres, Tiongkok dapat memberikan dinamika yang berdampak negatif pada stabilitas internasional karena Tiongkok muncul lebih asertif, dengan didukung oleh konsolidasi politik internal. Namun demikian, tetap akan ada celah positif bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara, terlebih mengingat keberadaan Asia Tenggara yang unik bagi Tiongkok karena *engagement* yang bersahabat. Hal tersebut akan menguntungkan Tiongkok yang tengah dikepung oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hanya saja, negara-negara Asia Tenggara harus jeli menangkap sinyal yang diberikan Tiongkok.

Dr. Rahadjeng Pulungsari Hadi menanggapi dengan menyoroti isu konsolidasi vs faksionalisasi pasca kongres dan fakta bahwa mayoritas loyalis Xi Jinping menduduki Politburo Standing Committee. Dari sisi budaya, ini adalah suatu hal yang biasa dilakukan di Tiongkok karena adanya beberapa prinsip: (1) Prinsip *guanxi* (hubungan atau relasi), yaitu menempatkan loyalitas guna menjaga relasi; (2) Prinsip *mianzi* (menjaga muka), yaitu untuk menjaga kehormatan

karena semua loyalis Xi ada di dalam satu tempat sehingga mudah mengambil keputusan; (3) Prinsip *renqing*, yaitu adanya hubungan atau perasaan yang lebih dekat dibandingkan lawan politik yang berseberangan; dan (4) *Xinren*, yakni terkait dengan rasa percaya. Selain itu, Tiongkok terindikasi menunjukkan *insecurity*, terlihat dengan adanya fokus pembahasan kepada “keamanan” dan “masalah”, sedangkan pembahasan terkait “perdamaian” dan “harmoni” menurun. Kemudian, disebutkan pula tiga ancaman yang dapat digarisbawahi pada kongres, yakni terkait intervensi asing, permasalahan perwujudan teknologi, dan yurisdiksi batas laut pada Laut Tiongkok Selatan.

Terkait panduan arah dalam konteks hubungan internasional, terdapat Strategi 28 Aksara yang dirumuskan pada era Deng Xiaoping dalam “empat jangan, dua lepaskan”, yakni bermakna untuk tidak menunjukkan keahlihan dan tetap mempelajari apa yang ada di dunia luar serta untuk tetap berkepala dingin. Tiongkok diarahkan untuk “jangan mengibarkan bendera sosialisme”, “jangan memimpin”, “jangan mencari musuh”, dan “jangan berkonfrontasi.” Dalam implementasinya pada masa kepemimpinan Xi Jinping, beberapa strategi mengalami pergeseran. Tiongkok memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin global serta berkonfrontasi, misalnya, dengan Taiwan agar dapat mempertahankan wilayah tersebut sebagai bagian dari Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok juga terlihat terus mencoba menjalin persahabatan dengan banyak negara. Hasil kongres tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok kedepannya. *Insecurity* Tiongkok dan keberadaan loyalis Xi Jinping akan mempengaruhi kebijakan dalam hal perlindungan negara dari serangan luar apapun bentuknya. Dalam berinteraksi dengan dunia luar, Tiongkok akan lebih agresif karena adanya pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang terjadi di dunia luar. Meski demikian, Tiongkok tetap menganggap “harmoni” adalah tujuan akhir. Para ahli menilai bahwa perdamaian belum menjadi prioritas karena fokus utama Tiongkok saat ini yakni untuk membenahan diri demi mewujudkan kebangkitan besar melalui visi “*Chinese dream*.”

Memaknai kongres ke-20 Partai Komunis Tiongkok, tentunya Indonesia harus bisa menyikapi dan memahami Tiongkok tidak hanya berdasarkan aspek sosial politiknya, namun juga dari aspek budaya dan nilai-nilai yang dianut. Hal ini guna membantu Indonesia untuk mengambil keputusan yang bijak dalam menghadapi politik luar negeri Tiongkok. Selain itu, Indonesia juga harus tetap mempertahankan sikap netral, objektif, serta menjaga harkat dan martabat Indonesia.

Prof. Evi Fitriani mengemukakan pentingnya untuk memaknai bahwa Kongres Partai Komunis Tiongkok bukan hanya bentuk konsolidasi internal faksi Xi Jinping, tetapi juga bentuk konsolidasi di dalam negara Tiongkok secara keseluruhan. Perspektif realis dalam digunakan dalam melihat fenomena ini karena Partai Komunis Tiongkok dinilai dapat mengatasi perbedaan yang muncul dari faksi-faksi. Kongres Partai Komunis Tiongkok merupakan respon untuk menghadapi tekanan domestik dan eksternal, serta dalam rangka mengendalikan kesatuan negara. Dalam hubungan internasional, narasi kekhawatiran negara-negara *major powers* terhadap Tiongkok mendominasi. Kompetisi dalam sektor ekonomi kemudian juga memberikan kepercayaan diri bagi Tiongkok untuk memodernisasi militer, yang mengakibatkan terciptanya kompetisi militer dan keamanan dengan negara-negara lain, termasuk *strategic competition* di berbagai kawasan. Selain itu, kemampuan kompetisi Tiongkok di bidang teknologi juga membuat *existing major powers* yang menguasai tata dunia sejak perang dunia ke-2 merasa terancam. Kompetisi eksternal Tiongkok tidak hanya terjadi dengan *existing major powers*, tetapi juga dengan *major powers* lain seperti Rusia. Misalnya, dalam konteks Ukraina, tidak bisa diasumsikan bahwa Tiongkok dan Rusia akan bersatu melawan negara barat. Ini juga merupakan faktor pendorong bagi Tiongkok untuk memperkuat integrasi domestik. Permasalahan lain seperti Taiwan yang melibatkan negara besar seperti Amerika Serikat serta antisipasi keberadaan kelompok pro demokrasi di Tiongkok menjadi tantangan eksternal yang tidak kalah penting. Terkait tantangan internal, alih-alih melihat kebijakan *zero-covid* sebagai sesuatu yang menjadikan Tiongkok lebih superior dibandingkan negara barat, kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai justifikasi upaya untuk mengawasi penduduk Tiongkok dengan ketat.

Di satu sisi, Tiongkok akan lebih berani untuk bersikap, karena lebih percaya diri tidak hanya terhadap AS tetapi terhadap dunia. Tiongkok lebih berani untuk memperjuangkan apa yang dianggap kepentingan mereka, termasuk untuk mewujudnya "*Chinese Dream*" di 2049, yang akan menjadi momentum 100 tahun Partai Komunis Tiongkok. Namun di sisi lain, Tiongkok menyadari bahwa ia tetap butuh teman, terlepas dari posisinya yang berlawanan dengan *major powers* lain. Karena itu, Tiongkok memiliki strategi untuk memperlihatkan dirinya sebagai negara besar yang mau membantu dan ikut bekerja sama. Hal ini dapat dilihat dari adanya inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* dan *Global Development Initiative*. Dalam COP27 dan G20, Tiongkok bersedia membantu negara lain untuk transisi energi dengan memberikan *climate finance*. Terlihat bahwa kini Tiongkok menggunakan kekuatan ekonominya untuk lebih aktif.

Konsolidasi Tiongkok dinilai akan berdampak baik bagi Indonesia karena sistem komando yang bisa mengatasi permasalahan faksionalisasi sehingga membuat kebijakan Tiongkok juga lebih terkonsolidasi dan tidak sporadis. Selain itu, elite di Indonesia, termasuk Presiden Joko Widodo, memiliki hubungan yang baik dengan elite di Tiongkok, terutama dengan Presiden Xi Jinping. Hal tersebut diharapkan dapat memperlancar urusan perjanjian dan kerjasama dengan Indonesia. Kerjasama di bidang keamanan dengan Tiongkok dapat menjadi peluang lebih bagi Indonesia, terlebih lagi Indonesia sejak 2005 telah memiliki kerjasama pertahanan dengan Tiongkok meskipun di dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan. Hal ini juga berkaitan dengan persaingan dengan Amerika Serikat. Untuk itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ini untuk menekan baik Amerika Serikat maupun Tiongkok untuk membantu Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu menjadi partner yang dapat mendorong Tiongkok untuk patuh dengan norma-norma internasional, sekaligus dapat bekerjasama untuk menciptakan norma baru yang lebih inklusif dan adil bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Tiongkok.

SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan: Pandangan terkait *community of shared future* (masyarakat senasib sepenanggungan). Bagaimana Indonesia harus mengantisipasi atau menghadapi perspektif tersebut? Apakah Indonesia bisa menjadi pihak yang dapat turut membentuk *shared future* tersebut?

Ardhitya E. Yeremia: Berdasarkan sebuah kajian analisis diskursus terkait multilateralisme dengan karakteristik Tiongkok, ditemukan bahwa terminologi yang disodorkan Tiongkok perlu dibaca dalam konteks bagaimana Tiongkok mengidentifikasi diri sebagai perwakilan negara berkembang. Perlu kehati-hatian untuk tidak menggunakan kata-kata bernuansa dukungan dalam diplomasi, karena akan menjadi suatu *positioning* dan mengakibatkan perpecah belahan. Pandangan *community of shared future* sesungguhnya menjadi undangan untuk membuka ruang kerja sama dengan negara mitra. *Belt and Road Initiative* seharusnya bisa dimaknai dalam konteks tersebut, bukan *China-led initiative*. Sayangnya, tidak banyak negara mitra yang cukup bijaksana dalam melakukan kalkulasi terkait bagaimana mereka bisa turut membentuk inisiatif tersebut. Pada realitanya, banyak negara mitra yang menganggap

inisiatif tersebut sebagai sesuatu yang pragmatis secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negerinya, sehingga lupa untuk turut membentuk. Kompleksitas dalam negeri masing-masing negara mitra juga menentukan sikap mereka terhadap inisiatif tersebut, terlihat dengan dominannya agensi-agensi dalam negeri yang mengedepankan pragmatisme ekonomi. Tiongkok tidak perlu selalu dilihat sebagai aktor yang selalu menjadi pusat. Tiongkok sangat membuka ruang untuk menerima masukan baik dalam *global security* maupun *global development initiative* yang ia promosikan. Pada intinya, perlu melihat Tiongkok dari dua arah karena baik untuk kebijakan luar negeri. Selain itu, antisipasi yang berlebihan tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Indonesia.

Pertanyaan: Apakah kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi momentum kerjasama Indonesia dan Tiongkok ditengah fakta bahwa secara ekonomi ternyata proyek ini mengandung banyak ketidakefisienan?

Ardhitya E. Yeremia: apapun kerjasamanya perlu didasari kalkulasi yang baik dan kebutuhan dalam negeri Indonesia. Perlu dilihat pula bahwa dalam rangka berhadapan dengan Tiongkok sebagai negara besar dengan *resources* yang besar pula, Indonesia tetap perlu mengedepankan perhitungan yang matang terkait dampak dalam bekerja sama. Karena proyek infrastruktur sifatnya jangka panjang, jangan sampai ini berpotensi sebagai monumen kegagalan.

Pertanyaan: apakah Xi Jinping 3.0 diperkirakan lebih dari tahun 2022-2027? Karena Politburo Standing Committee tidak memberikan sinyal adanya calon sekjen di PKT selanjutnya di periode tersebut. Apabila Xi Jinping 3.0 berkesinambungan, apakah Tiongkok semakin asertif mengingat target “*Chinese Dreams*” di tahun 2049?

Rahadjeng Pulungsari Hadi: kecenderungan kesinambungan Xi Jinping ada meskipun dibatasi hanya 2 tahun. Target 2049 merupakan ambisi yang sangat ingin dicapai oleh Xi Jinping. Dengan demikian, kesinambungan dalam kebijakan pimpinan masih ada, namun ada perubahan-perubahan tergantung pada situasi dan kondisi yang dialami di masa mendatang.

Klaus H. Raditio: di Politburo Standing Committee periode ketiga, tidak kelihatan akan ada penerus Xi Jinping. Dari segi urusan partai memang tidak ada batasan periode. Namun, menjadi presiden hanya boleh dua periode dan itu sudah diamandemen. Harus dilihat alasan mengapa Xi Jinping mau menjabat untuk yang ketiga kalinya baik menjadi sekretaris jenderal maupun

president. Pertama, karena Xi Jinping ingin mencapai target *national rejuvenation*, yang mana ia ingin sekali mewujudkan hal tersebut di masanya. Apabila dapat dicapai sebelum 2049 tentunya akan lebih baik. Kemudian, apakah standar *national rejuvenation*? Jika dibaca dari laporan pembukaan PKT ke-20, sepertinya Taiwan memegang kunci yang penting. Bisa jadi reunifikasi menjadi standar dari *national rejuvenation*. Jika iya, ini akan menjadi hal yang berat bagi Tiongkok karena tentunya itu tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat, terutama jika melihat hasil survei yang diadakan berbagai litbang. Berdasarkan survei, masyarakat Taiwan yang ingin kembali ke pangkuan Tiongkok semakin menurun, terlebih lagi masyarakat Taiwan didominasi oleh kaum muda yang cenderung tidak berminat terhadap Beijing. Terlebih lagi, rasa tidak berminat ini juga muncul melihat bagaimana Beijing memperlakukan Hongkong dengan *One Country Two System*. Ada anggapan “*the vulnerable China is even more dangerous than the strong China*,” karena Tiongkok bisa melakukan tindakan-tindakan yang asertif saat mengalami *vulnerability* bahkan menuju kepada konflik. Meski Xi Jinping punya minat untuk mewujudkan *national rejuvenation*, tetapi masih tidak bisa dipastikan apakah pasca 2027 Xi Jinping masih bisa menjabat mengingat usia.

Ardhitya E. Yeremia: perlu dilihat *power trajectory*. Apabila perkembangan ekonomi dan militer semakin kuat, tentunya kemungkinan lebih asertif tetap ada. dalam konteks Xi Jinping 3.0 juga perlu dilihat dari perkembangan *power capability*-nya. Indonesia harus mulai membayangkan berhadapan dengan Tiongkok sebagai negara besar dan mengantisipasi berdasarkan asumsi tersebut. Tiongkok yang semakin kuat tentu akan menghadirkan berbagai tantangan, walaupun juga menghadirkan peluang. Ada masa dimana awal tahun 2000-an Tiongkok mulai bangkit dan memberikan banyak konsesi, terutama dalam hubungan dengan Asia Tenggara. Terutama ketika Tiongkok menandatangani DOC di Laut Tiongkok Selatan, sehingga mendulang pujian karena memberikan ketenangan di kawasan tersebut. Meski dapat menjadi harapan, tetapi tetap harus berpikir secara realistis bahwa negara yang makin kuat akan berperilaku seperti negara besar pada umumnya.

Pertanyaan: bagaimana minat Tiongkok ditengah invasi Rusia? Kemudian, dengan melihat hasil kongres Amerika Serikat terbaru yang mendudukan Republik sebagai *House of Speaker*, apakah dapat diproyeksikan dinamika yang lebih tegang pasca penyampaian *Red Line* Tiongkok oleh Xi Jinping terhadap Biden? Bagaimana sifat hubungan diplomatik ekonomi dan militer Tiongkok dengan negara besar?

Prof. Evi Fitriani: posisi kongres AS yang didominasi oleh Republik akan keras. Sebelum partai Republik dibawah Biden pun juga sudah memanas. Apalagi melihat proyeksi kongres ke-20, Tiongkok akan lebih berani sehingga membuat situasi semakin tidak stabil. Jangan lupa pula bahwa Tiongkok dan Rusia pernah terlibat perang perbatasan tahun 1969. Jadi, belum tentu bisa dikatakan bahwa meski ada Amerika Serikat sebagai ancaman bersama, Tiongkok dan Rusia akan bersatu karena dinamikanya cukup tinggi dan mereka pun juga bersaing di Asia Tengah, salah satunya di *Shanghai Cooperation*. Untuk itu, perlu memahami semua perkembangan Tiongkok melalui kajian-kajian mendalam untuk dapat menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Begitu pula dengan memahami AS dan sekutunya. Terkait kerjasama, perlu bersikap rasional bahwa Indonesia memerlukan investor yang memberikan *trade-off* yang baik. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipolitisasi dan menjadi sentimen negatif terhadap Tiongkok di dalam negeri. Untuk itu, penting sekali untuk memilih investor yang bertanggung jawab. Tidak semua investasi dari Tiongkok baik, tapi hal ini bisa menjadi peluang. Indonesia tetap harus punya *bargaining position*.

Pertanyaan: Tiongkok menyadari bahwa dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya perlu mitra eksternal. Ditengah ketidakpastian geopolitik global, negara mana saja yang akan disasar oleh Tiongkok untuk menjadi mitra strategis?

Klaus H. Raditio: semua negara ASEAN sudah menjadi mitra strategis melalui berbagai macam inisiatif, termasuk *comprehensive partnership* dan lain sebagainya. Tiongkok akan mau berpartner dengan negara manapun, karena dia membutuhkan teman. Terkait konflik Rusia-Ukraina, Tiongkok sebetulnya tidak sedang membela Rusia, melainkan dirinya sendiri. Ia melihat dirinya sendiri pada Rusia, dalam arti ia dipojokkan oleh NATO. Di sisi lain, Rusia semakin tergantung pada Tiongkok ditengah-tengah konflik yang tak kunjung usai. Ketergantungan ini menguntungkan bagi Beijing.

Ardhitya E. Yeremia: Negara Asia Tenggara merespon Tiongkok secara kompleks. Namun untuk disebut sebagai mitra strategis, sebetulnya *engagement* Tiongkok secara bilateral dengan masing-masing negara Asia Tenggara berbeda-beda. Negara di Asia Tenggara dalam berhubungan dengan Tiongkok sangat dinamis dan belum tentu bisa “dipegang” oleh Tiongkok. Respon negara Asia Tenggara tidak pernah seragam. Misal, Vietnam yang merupakan sesama negara berpaham komunisme, respon terhadap kongres cukup keras

meskipun secara ekonomi cukup pragmatis. Ditengah ketidakjelasan ini, justru di Asia Tenggara ini lah Tiongkok harus terus *engage*.

Prof. Evi Fitriani: Asia Tenggara penting bagi Tiongkok. Tidak seperti dinamika di Kawasan lain, misalnya dinamika hubungan Amerika Serikat terhadap Amerika Latin, Asia Tenggara tidak bisa di *manage* oleh Tiongkok. Untuk itu, Tiongkok harus berhati-hati dan tidak bisa bersikap semena-mena terhadap masing-masing negara di Asia Tenggara.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Jumat, 25 November
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id